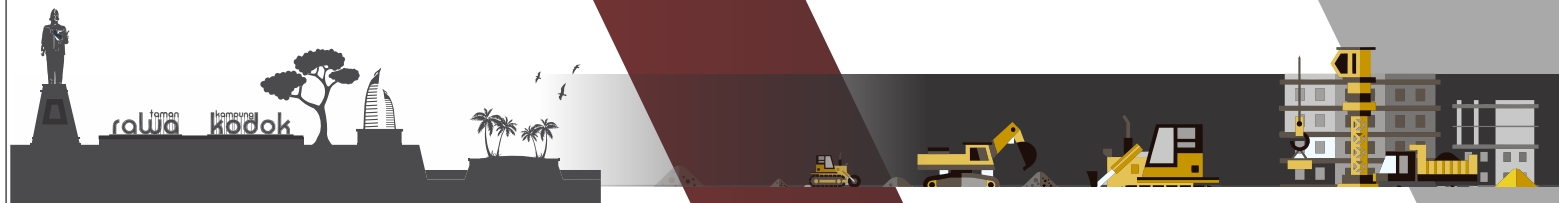




DPUPR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur layak kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasihNya dan atas perkenanNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, merupakan Laporan Tahun Pertama dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah atas penggunaan anggaran untuk melaksanakan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah selama Tahun 2024. Garis besar laporan ini memuat hal-hal pokok antara lain :

1. Gambaran umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
 2. Perencanaan kinerja yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi serta ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
-


3. Capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis, evaluasi dan pengukuran kinerja.

Tujuan dari laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Bupati) atas kinerja yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam upaya perbaikan pelaksanaan tugas maupun dalam penetapan target kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, khususnya dalam upaya meningkatkan manajemen kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah demi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun 1 (satu) tahun dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LKjIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2024 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam berbagai bentuk guna penyusunan laporan ini, kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada dalam penyajiannya yang akan selalu menjadi perhatian untuk diperbaiki serta ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Masohi, Januari 2025
Kepala Dinas



MASAN FIRDAUSI, ST
Pembina Tk. I – IV/b
NIP 19740703 200312 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
➤ Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024	viii
➤ Tabel Program dan Realisasi Anggaran Thn. 2024	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-6
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.1.1. Kedudukan	2
1.1.2. Tugas Pokok	2
1.1.3. Fungsi	2
1.1.4. Struktur Organisasi	3
➤ Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	4
➤ Tabel 1.1. Jenjang kepangkatan PNS dan Golongan Ruang SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah	4
➤ Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Kedudukan Tahun 2024	4
➤ Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kualifikasi Jabatan Tahun 2024	4
1.2. Permasalahan Utama/ Issu-Issu Strategis Organisasi	5
1.2.1. Permasalahan Utama	5
1.2.2. Issu-Issu Strategis Organisasi	5

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7-14
	2.1. Rencana Strategis	7
	2.1.1. Visi dan Misi	7
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran	7
	2.2. Indikator Kinerja Utama	8
	2.3. Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ...		9
	➤ Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024		
	Sasaran Strategis, IKU dan Target		11
	➤ Tabel 2.3.2. Perjanjian Kinerja Rencana Program		
	Dan Anggaran		12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20-39
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
	<u>Sasaran 1</u> : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		
	Perangkat Daerah		21
	➤ Tabel 3.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja		
	Tujuan Tahun 2024		21
	<u>Sasaran 2</u> : Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya		
	Air Yang Memadai		23
	➤ Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja		
	Tujuan Tahun 2024		23
	<u>Sasaran 3</u> : Tersedianya Infrastruktur Jalan Jembatan serta		
	Sarana dan Prasarana		23
	➤ Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian		
	Kinerja Tujuan Tahun 2022 dengan		
	Tahun 2021 dan 2020		23
	<u>Sasaran 4</u> : Meningkatnya Presenatase Ruang Terbuka		
	Hijau dan Meningkatnya Penyusunan Norma		
	Standard an Kriteria Pemanfaatan Ruang serta		
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		23

➤ Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2022 dengan Tahun 2021, 2020 dan 2019	23
<u>Sasaran 5</u> : Tersedianya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Permukiman	24
➤ Tabel 3.5. Capaian IKU no.9 Tahun 2023	24
➤ Tabel 3.5.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra	25
➤ Tabel 3.6. Capaian IKU no.12 dan 13 Tahun 2023	26
➤ Tabel 3.6.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Sebelumnya	26
➤ Tabel 3.6.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra	27
➤ Tabel 3.7. Capaian IKU no.12 dan 13 Tahun 2023	29
➤ Tabel 3.7.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Sebelumnya	30
➤ Tabel 3.7.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra	30
➤ Tabel 3.8. Capaian IKU no.12 dan 13 Tahun 2023	32
➤ Tabel 3.8.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Sebelumnya	32
➤ Tabel 3.8.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra	32
➤ Tabel 3.9. Capaian IKU no.12 dan 13 Tahun 2023	34
➤ Tabel 3.9.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Sebelumnya	34
➤ Tabel 3.9.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra	35
➤ Tabel 3.10. Efisien Penggunaan Sumber Daya	39

BAB IV	PENUTUP	40-41
	4.1. Kesimpulan	40
	4.2. Saran	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 - 2026. Guna mewujudkan Agenda Pembangunan 4 yakni sebagai "Memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana", yang merupakan Agenda Pembangunan 4 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kabupaten Maluku Tengah telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan

dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan 2 sasaran strategis yang dapat diukur melalui 6 Indikator Kinerja Utama dan 10 Indikator Sasaran yang diimplementasikan dalam 12 Program dan 23 Kegiatan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 225.433.380.945,- dengan Realisasi sebesar Rp. 153.969.954.156,- (68,30%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan tersebut diatas.

Capaian kinerja dan gambaran realisasi anggaran secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

TABEL CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (RPD)	TARGET 2024 (%)	REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAPAIAN REALISASI 2024 (%)	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(9)</i>
Tersedianya Infrastruktur yang Terintegrasi	1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	82,86	59,86	72,24	
	2	Persentase penduduk berakses air minum	91,86	71,74	78,09	
	3	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78,80	61,49	78,03	
	4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	98,34	12,54	12,75	
	5	Rasio jaringan irigasi	0,95	0,67	70,52	
	6	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	90,59	91,40	100,00	

Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.250.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.816.263.330,-** Realisasi Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN TAHUN 2024

No Rekening					Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Presentase
							(Kinerja)	(Rp)	(Kinerja)	(Rp)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					153,969,954,156	68.30
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			193.674.484.050		119.966.769.309	68.30
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.818.420.000	90.25	12.759.330.408	90.25
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	8 Dok	406.537.000	8 Dok	181.891.974	73.18
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	339.005.000	2 Dok	157.334.974	85.83
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 Dok	16.129.000	1 Dok	1.689.000	98.15
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok	6.565.000	1 Dok	2.900.000	94.33
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD	1 Dok	5.734.000	1 Dok	5.734.000	99.97

1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dok	5.734.000	1 Dok	5.734.000	99.98
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Forum OPD	1 Keg	29.120.000	1 Keg	4.250.000	99.96
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi	1 Dok	4.250.000	1 Dok	4.250.000	100,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	10.940.083.000	1 Tahun	9.775.423.614	93.24
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang disediakan	1 Tahun	9.836.311.000	1 Tahun	8.892.065.614	93.65
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Administrasi yang disediakan	1 Tahun	907.200.000	1 Tahun	785.200.000	90.85
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	143200000	1 Dok	82.440.000	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuang Akhir Tahun yang tersusun	1 Tahun	29.782.000	1 Tahun	6.570.000	78.96
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran yang tersusun	1 Tahun	19.454.000	1 Tahun	5.014.000	99.90
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 Tahun	4.136.000	1 Tahun	4.136.000	99.76
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	162.300.000	1 Tahun	107.670.000	96.93
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD SKPD yang disusun	1 Tahun	37.840.000	1 Tahun	11.710.000	99.93

1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang di data	1 Tahun	124.460.000	1 Tahun	95.960.000	96.31
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	809.879.000	1 Tahun	175.323.671	60.11
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		150.000.000		0	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Pegawai yang didata dan diolah	1 Tahun	36.334.000	1 Tahun	8.950.000	99.28
1	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Pegawai	1 Tahun	14.540.000	-	9.940.000	98.49
1	03	01	2.05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek yang diadakan	1 Tahun	456.300.000	1 Tahun	156.433.671	50.72
1	03	01	2.05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	152705000		0	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1.006.471.000	1 Tahun	855.110.778	88.67
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Tahun	5676000	1 Tahun	5.676.000	0.00
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1 Tahun	-	1 Tahun	0	99.73
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	114435000	1 Tahun	76.505.000	95.78

1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dokumen yang dicetak atau disediakan	1 Tahun	90360000	1 Tahun	65.360.000	86.44
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan peraturan Per Unadang-undangan yang disediakan	1 Tahun	46000000	1 Tahun	35.410.000	74.65
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan dalam daerah yang diikuti oleh pegawai	1 Tahun	750000000	1 Tahun	672.159.778	85.67
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Tahun	2.575.648.000	1 Tahun	33.657.500	99.35
1	03	02	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang di sediakan	1 unit	90000000	1 unit	0	98.57
1	03	01	2.07	000 3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang Disediakan	1 unit	1400000000		0	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meberl yang disediakan	1 Paket	62500000	30 Unit	62.000.000	99.75
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	1023148000	26 Unit	271.657.500	99.64
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	248.680.000	1 Tahun	185.161.559	52.84
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Surat Menyurat Yang Disediakan	1 Tahun	9600000	1 Tahun	9.600.000	25.00

1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Tahun	196000000	1 Tahun	132.481.559	66.32
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	1 Tahun	22500000	1 Tahun	22.500.000	41.18
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 Tahun	20580000	1 Tahun	20.580.500	25.27
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.668.822.000	1 Tahun	1.145.091.312	71.75
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 Tahun	96000000	1 Tahun	84.000.000	61.11
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	1 Tahun	275500000	1 Tahun	208.176.812	55.08
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 unit	400000000		30.000.000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang di Rehabilitasi	2 Unit	773662000		733.644.500	94.84
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Tahun	78050000	1 Tahun	741.250.000	94.07
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	45610000	-	18.020.000	52.08
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	100%	27.170.198.050	94%	18.169.358.528	73.10
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang tersedia	3564 M	13.979.838.850	3564 M	7.897.576.700	71.16

1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Sungai yang dibangun	1935 M	4656471800	1935 M	2.744.942.500	73.31
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	344 M	2994216300	344 M	2.046.473.000	57.16
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Seawall dan pengaman pantai yang dibangun	1285 M	6329150750	1285 M	3.106.161.200	74.59
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pengembangan dan pengolahan sistem irigasi primer dan sekunder yang dibangun	2 D.I	13.190.359.200	2 D.I	10.271.781.828	77.42
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan hidup yang disusun	1 Dok	450000000	1 Dok	97.420.000	28.33
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	2 D.I	12390359200	2 D.I	9.973.561.828	80.42
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Operasional pemeliharaan jaringan irigasi	1 Tahun	250000000	1 Tahun	200.800.0000	92.85
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	jumlah dokumen pengelolaan dan pengawasan irigasi	1 Dok	100000000	1 Dok	0	3.95
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	100%	10.043.468.950	77.60%	6.082.118.666	94.25

						Penyediaan Air Minum						
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	2298 Unit	10.043.468.950	2298 Unit	6.082.118.666	58.33	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dok	400000000	4 Dok	399.260.000	99.82	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supevisi SPAM	1 Tahun	-	1 Tahun	0	94.68	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibangun	630 Unit	-	630 Unit	0	87.89	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Perkotaan yang ditingkatkan	265 Unit	-	265 Unit	0	81.87	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan yang ditingkatkan	1403 Unit	-	1403 Unit	0	46.05	
1	03	03	2.01	025	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yabf dDitingkatkan		9193468950		5.682.858.666		
1	03	03	2.01	025	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			450000000		0		
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%	600.000.000	21.25%	89.510.000	98.23	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Persampahan di Kabupaten	90000 M2	600.000.000		89.510.000	98.23	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dok	100000000	-	0	-	

1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang disediakan	-	-	--	-	-
1	03	04	2.01	016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dioptimalisasi		500000000		89.510.000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	763.477.100	98.30%	132.051.100	98.23
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah domestik dalam daerah	1277 Unit	763.477.100	1268 Unit	132.051.100	87.95
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibangun	1277 Unit	-	1268 Unit	0	87.95
1	03	05	2.01	019	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi		400000000		1.980.000	
1	03	05	2.01	039	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		363477100		130.071.100	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	11.732.177.000	89.27%	8.676.035.329	86.51

1	03	06	2.01		Total Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	8650 M	11.732.177.000	7722 M	8.676.035.329	58.13
1	03	06	2.01	014 8	Penyusunan rencana kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		-		0	24.59
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang dibangun	8650 M	11732177000	7722 M	8.676.035.329	58.79
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	100%	-	88.97%	0	90.21
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman	64	-	64	0	69.35
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Infrastruktur kawasan permukiman yang dibangun dan dikembangkan	14,54 Km	-	12,97 Km	0	69.00
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Supervisi	1 Dok	-	1 Dok	0	99.85
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	100%	24.825.419.550	95.80%	13.145.993.176	93.99

1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung	48 Unit	24.825.419.550	48 Unit	13.145.993.176	60.28
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung, SIMBG Yang diselenggarakan	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	87.580.000	58.96
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara	6050 M2	-	5810 M2	0	65.15
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten	-	-	-	0	29.40
					Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota			-		0	65.75
					Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsui banguna gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota			-		0	51.01
1	03	08	2.01	019	Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Disusun		212366000		112.951.220	
1	03	08	2.01	020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		75000000		1.358.000	
1	03	08	2.01	021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Milik Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Milik Kepentingan		24358053550		12.944.103.956	

						Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	12.251.607.928	67.95%	3.925.451.530	70.72
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terselenggara	17	12.251.607.928	17	3.925.451.530	77.60
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penataan bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bangunan dan Lingkungan yang disusun	-	800000000	-	649.842.978	83.87
1	03	09	2.01	09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya1	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Disupervisi		200000000		0	49.22
1	03	09	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		11251607928	3740 M2	3.275.608.552	77.73
					Pemeliharaan bangunan dan lingkungan			-		0	94.82
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	100%	86.942.121.872	96.47%	55.975.198.362	93.95

1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	100%	86.942.121.872	96.47%	55.975.198.362	65.78
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	4 Dok	1050000000	4 Dok	602.670.000	90.27
					Pengelolaan leger jalan			370900000		115.600.000	39.87
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen kondisi jalan/jembatan yang tersusun	2 Dok	750000000	2 Dok	427.150.000	71.16
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direkonstruksi	17,75 Km	38063773344	17,75 Km	27.676.217.471	69.22
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	5,32 Km	8212840600	5,32 Km	3.165.409.450	57.94
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara rutin	1 Tahun	990970000	1 Tahun	747.539.060	90.16
1	03	10	2.01	18	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang direhabilitasi	2 Paket	5982517090	2 Paket	4.787.162.605	50.50
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan dan Jembatan	2 Paket	-	2 Paket	0	58.49
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	800.000.000	91.65%	548.238.044	85.37
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih	150	400.000.000	150	548.238.044	7.57
1	03	11	2.01	010	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis yang Difasilitas		100000000		0	

1	03	11	2.02	113	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		300000000		35.764.184	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00		35.764.184	94.40
1	03	11	2.02	013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	JPenyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		50000000		35.764.184	94.40
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penyelangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi		100.000.000		0	
1	03	11	2.03	06	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jasa Konstruksi	Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Evaluasi		100.000.000		0	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan, Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2	250.000.000	2	213.070.000	65.66
1	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		100000000		99.900.000	
1	03	11	2.04	06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	1500000000		113.170.000	

1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	727.593.600	54.90%	463.484.166	58.67
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	4 Dok	427.594.000	4 Dok	463.484.166	98.45
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang mendapatkan persetujuan substansi	3 Dok	-	3 Dok	0	98.45
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada/Selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada/Selain RTRW Kabupaten/Kota		369024000		0	
1	03	12	2.01	012	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi		58570000		58.516.500	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			199999600		18.090.000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		199999600		18.090.000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100000000		35.564.000	
1	03	12	2.04	023 3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang		100000000		35.564.000	

Dari tahun ke tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN ANGGARAN	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	
2022	Belanja Langsung	222.296.789.700	200.475.648.353	90,18	
	Pendapatan Asli Daerah	2.800.000.000	542.076.475	19,36	
	Jumlah	225.096.789.700	201.017.724.828	89,30	
2023	Belanja Langsung	225.433.380.945	153.969.954.156	68,30	
	Pendapatan Asli Daerah	11.250.000.000	1.279.680.315	11,37	
	Jumlah	236.683.380.945	155.249.634.471	65,59	
2024	Belanja Langsung	165.471.730.424	123.853.472.915	74,85	
	Pendapatan Asli Daerah	3.250.000.000	816.263.330	25,12	
	Jumlah	168.721.730.424	124.669.736.245	73,90	

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih baik sekalipun rata-rata pencapaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menurun, dikarenakan penyerapan anggaran yang menurun yang berimbas dari paket-paket pekerjaan yang tidak terlaksana dan paket-paket pekerjaan yang anggarannya luncur di tahun berikutnya karena pekerjaan belum selesai

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi agar tercipta "Good Governance" dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai bentuk pelayanan yang nyata kepada masyarakat.

Masohi, Januari 2025

Kepala Dinas



 SAN FIRDAUSI, ST
 NIP. 19740703 200312 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari beberapa sub urusan antara lain :

1. Sumber Daya Air
2. Air Minum
3. Persampahan
4. Air Limbah
5. Drainase
6. Bangunan Gedung
7. Penataan Bangunan dan Lingkungan
8. Jalan
9. Jasa Konstruksi
10. Penataan Ruang

Oleh karena begitu pentingnya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga diperlukan kepastian adanya lembaga daerah yang menyelenggarakannya sesuai dengan kewenangan sehingga dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupataen Maluku Tengah.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah, dan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

1.1.1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

1.1.3. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Tugas Pokok, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, dan penataan ruang
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan urusan sekretariat dinas;
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1.1.4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Informasi Publik
 - Fungsional Perencana
3. Bidang Pengairan, membawahi :
4. Bidang Bina Marga, membawahi :
5. Bidang Jasa Konstruksi dan Pelayanan Umum, membawahi :
6. Bidang Cipta Karya, membawahi :
7. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perumahan, membawahi :
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum seperti tersebut di atas tergambar bahwa seluruh urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan masing-masing sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dapat diselenggarakan, baik pada tingkat seksi maupun bidang.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah seperti berikut ini : .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan tupoksinya sebanyak orang yang terdiri atas PNS 87 orang, PPPK sebanyak 11 Honorer sebanyak 32 orang. Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jenjang kepegangatan PNS dan Golongan Ruang SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	15	2	17
2	Golongan III	46	20	66
3	Golongan IV	4	0	4

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kualifikasi Pendidikan Dan Kedudukan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	20	6	13	1	40
2	D2	3	0	0	0	3
3	D3	0	1	1	0	1
4	D4/S1	37	14	8	8	67
5	S2	5	1	0	1	7

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kualifikasi Jabatan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	STRUKTURAL	8
2	FUNGSIONAL	7
3	STAF	72
4	NON PNS	32
JUMLAH		119

1.2. PERMASALAHAN UTAMA / ISSU-ISSU STRATEGIS ORGANISASI

1.2.1 Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah antara lain :

1. Konektivitas jalan dari desa yang berada pada daerah pegunungan menuju ibu kota kecamatan masuk dalam kawasan lindung.
2. Kurangnya jalan dalam kondisi baik
3. Terbatasnya jaringan irigasi untuk memenuhi tuntutan program kedaulatan pangan
4. Kurangnya sarana prasarana pengaman daerah rawan abrasi dan rawan banjir
5. Rendahnya Akses Masyarakat terhadap air minum
6. Masih Rendahnya Akses Masyarakat terhadap sanitasi yang layak
7. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman di wilayah perdesaaan
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jasa konstruksi
9. Kurangnya tenaga kerja konstruksi
10. Menurunnya ketersediaan air baku untuk irigasi
11. Belum terpenuhinya presentase RTH yang terbangun untuk kawasan perkotaan
12. Belum terpenuhinya peta analog dan peta digital

1.2.2 Issu- Issu Strategis Organisasi

1. Meningkatkan kapasitas, kualitas, konektivitas infrastruktur jalan jembatan dan pembangunan sarana prasarana pelengkap;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Sumber daya Air;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi dan sarana pemukiman;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 4 (Empat) tahun, periode tahun 2023-2026 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang tertuang didalam Agenda Pembangunan 4 “Memperkuat insfrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana” dan Agenda Pembangunan 5 “Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan transparansi”.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran.

Agenda Pembangunan 4 “Memperkuat insfrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana”

Tujuan : Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Sasaran : Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi

Indikator Sasaran :

- 1) Indeks Layan Dasar
 - Presentase rumah tinggal bersanitasi
 - Presentase penduduk berakses air minum
 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotan dan perdesaan
- 2) Indeks Konektivitas

- Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 - Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)
- 3) Indeks Sarpras Pendukung Ekonomi
- Presentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik
 - Rasio jaringan irigasi
 - Presentase jalan desa Strategis dalam kondisi baik
- 4) Indeks Sarpras Pendukung Lingkungan dan Kebencanaan
- Presentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
 - Tidak terjadi genangan >2 kali setahun
 - Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
 - Rasio bangunan ber-IMB persatuan Bangunan Gedung
 - Ruang Publik yang berubah peruntukannya
 - Ketaatan terhadap RTRW
 - Rasio Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi

Agenda Pembangunan 5 “Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan transparansi”

Tujuan : Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan Transparan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Indikator Sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian.	Indeks Infrastruktur Daerah	Tersedianya Infrastruktur yang terintegrasi	Indeks Layanan Dasar - Persentase rumah tinggal bersanitasi - Persentase penduduk berakses air minum
			Indeks Konektivitas - Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi Baik
			Indeks Satpras pendukung Ekonomi - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik - Rasio Jaringan irigasi
			Indeks Supras Lingkungan dan Kebencanaan - Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

2.3. RENCANA KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah dalam tahun 2024. Target kinerja merupakan representasi nilai kumulatif yang harus dicapai dalam tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan perbandingan dalam mengukur keberhasilan organisasi. Target kinerja kegiatan juga diuraikan dalam rencana kinerja tahun 2024 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud komitmen antara pemberi Amanah dan penerima Amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah juga telah menetapkan rencana kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Penjabat Bupati. Secara ringkas gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SASARAN STRATEGIS, IKU DAN TARGET

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024 (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi	Indeks Layanan Dasar		
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	82.86	Indikator Kinerja Utama
	Persentase penduduk berakses air minum	91.86	Indikator Kinerja Utama
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	82.36	Indikator Sasaran
	Indeks Konektivitas		
	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78.80	Indikator Kinerja Utama
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	66.33	Indikator Sasaran
	Indeks Satpras pendukung Ekonomi		
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	98.34	Indikator Kinerja Utama
	Rasio jaringan irigasi	0.95	Indikator Kinerja Utama
	Persentase jalan desa strategis dalam kondisi baik	30.89	Indikator Sasaran
	Indeks Sapras Lingkungan dan Kebencanaan		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	9.52	Indikator Sasaran
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	85.95	Indikator Sasaran
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perk	90.59	Indikator Kinerja Utama
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan gedung	0.40	Indikator Sasaran
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.27	Indikator Sasaran
	Ketaatan terhadap RTRW	91.34	Indikator Sasaran
	Rasio Tenaga Teknis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	60.00	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	91.60	Indikator Sasaran

Tabe 2.3.2
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN 2025

Rekening					Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	(Kinerja)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							Rp113.019.777.891,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp113.019.777.891,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Rp113.019.777.891,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	Rp13.880.953.891,00	
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	Rp180.000.000,00	
1	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Rp100.000.000,00	
1	03	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dok	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dok	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Rp20.000.000,00	
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp10.336.233.100,00	
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Rp8.094.533.100,00	
1	03	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	Rp2.196.700.000,00	
1	03	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp235.000.000,00	
1	03	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	Rp35.000.000,00	

1	03	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	Rp125.000.000,00	
1	03	01	2,03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp400.000.000,00	
1	03	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Rp300.000.000,00	
1	03	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Rp100.000.000,00	
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp794.960.000,00	
1	03	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Rp10.000.000,00	
1	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Rp25.000.000,00	
1	03	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Rp10.000.000,00	
1	03	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Rp50.000.000,00	
1	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Rp30.000.000,00	
1	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Rp30.000.000,00	
1	03	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Rp9.960.000,00	
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Rp600.000.000,00	
1	03	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Rp628.760.000,00	
1	03	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	Rp80.000.000,00	
1	03	01	2,07	0003	Pengadaan Alat Besar	1 Paket	Rp0,00	
1	03	01	2,07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Paket	Rp100.000.000,00	
1	03	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	1 Paket	Rp149.000.000,00	
1	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	Rp299.760.000,00	
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Rp200.200.000,00	
1	03	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Rp10.000.000,00	
1	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Rp145.200.000,00	
1	03	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Rp20.000.000,00	
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Rp25.000.000,00	
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Rp1.105.800.791,00	
1	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	Rp105.000.000,00	
1	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	Rp239.000.000,00	

1	03	01	2,09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Tahun	Rp425.000.000,00	
1	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp82.000.000,00	
1	03	01	2,09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Tahun	Rp15.000.000,00	
1	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp150.000.000,00	
1	03	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp74.800.791,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100%	Rp14.705.368.000,00	
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3564 M	Rp9.682.864.000,00	
1	03	02	2,01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	344 M	Rp2.284.544.000,00	
1	03	02	2,01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	1935 M	Rp3.135.000.000,00	
1	03	02	2,01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1285 M	Rp4.263.320.000,00	
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 D.I	Rp5.022.504.000,00	
1	03	02	2,02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2 D.I	Rp4.192.504.000,00	
1	03	02	2,02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1 Tahun	Rp400.000.000,00	
1	03	02	2,02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dok	Rp430.000.000,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100%	Rp14.998.684.791,00	
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2298 Unit	Rp14.998.684.791,00	
1	03	03	2,01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4 Dok	Rp1.947.692.300,00	
1	03	03	2,01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	265 Unit	Rp5.353.705.491,00	
1	03	03	2,01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1403 Unit	Rp7.697.287.000,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100%	Rp1.040.000.000,00	
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1277 Unit	Rp1.040.000.000,00	
1	03	05	2,01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Rp640.000.000,00	

1	03	05	2,01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Rp400.000.000,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100%	Rp3.630.000.000,00	
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8650 M	Rp3.630.000.000,00	
1	03	06	2,01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	8650 M	Rp3.630.000.000,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100%	Rp12.081.269.209,00	
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	48 Unit	Rp12.081.269.209,00	
1	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp100.000.000,00	
1	03	08	2,01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	-	Rp200.000.000,00	
1	03	08	2,01	0021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp11.606.269.209,00	
1	03	08	2,01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Tahun	Rp175.000.000,00	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	Rp3.015.000.000,00	
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	17	Rp3.015.000.000,00	
1	03	09	2,01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Rp2.915.000.000,00	
1	03	09	2,01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Rp100.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100%	Rp47.368.502.000,00	
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	Rp47.368.502.000,00	
1	03	10	2,01	0028	Pengelolaan Leger Jalan		Rp150.000.000,00	

1	03	10	2,01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4 Dok	Rp430.000.000,00	
1	03	10	2,01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2 Paket	Rp600.000.000,00	
1	03	10	2,01	0032	Pembangunan Jalan	7,4 Km	Rp18.013.439.000,00	
1	03	10	2,01	0033	Rekonstruksi Jalan	17,75 Km	Rp22.889.582.000,00	
1	03	10	2,01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,32 Km	Rp1.403.284.000,00	
1	03	10	2,01	0040	Pembangunan Jembatan	2 Paket	Rp2.228.500.000,00	
1	03	10	2,01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dok	Rp400.000.000,00	
1	03	10	2,01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1 Tahun	Rp1.253.697.000,00	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100%	Rp600.000.000,00	
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	150	Rp250.000.000,00	
1	03	11	2,01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1 Tahun	Rp250.000.000,00	
1	03	11	2,02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp100.000.000,00	
1	03	11	2,02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		Rp50.000.000,00	
1	03	11	2,02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI		Rp50.000.000,00	
1	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2	Rp250.000.000,00	
1	03	11	2,04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1 Tahun	Rp100.000.000,00	
1	03	11	2,04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1 Tahun	Rp150.000.000,00	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100%	Rp1.700.000.000,00	
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4 Dok	Rp1.250.000.000,00	
1	03	12	2,01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp250.000.000,00	
1	03	12	2,01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota		Rp850.000.000,00	
1	03	12	2,01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dok	Rp75.000.000,00	
1	03	12	2,01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		Rp75.000.000,00	
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rp300.000.000,00	
1	03	12	2,03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Rp300.000.000,00	

1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rp150.000.000,00	
1	03	12	2,04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp150.000.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama dan 10 (sepuluh) Indikator Sasaran yang diimplementasikan dalam 12 (dua belas) Program dan 23 (Dua puluh tiga) Kegiatan beserta target kinerja masing-masing IKU. Pengukuran tingkat kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) dan penataan ruang berdasarkan rencana kinerja tahunan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilaksanakan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan Peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian	Indeks Infrastruktur Daerah	75.09	74.27	98.91
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	91.60	83,07	90,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 (data diolah)

b. Indikator Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan indikator kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi	82.86	59.86	72.24
		Persentase penduduk berakses air minum	91.86	71.74	78.10
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	82.36	79.86	96.96
		Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78.80	61.49	78.03
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	66.33	61.49	92.70
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	98.34	97.34	98.98
		Rasio jaringan irigasi	0.95	0.67	70.53
		Persentase jalan desa strategis dalam kondisi baik	30.89	28.25	91.45
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	9.52	10.52	110.50

		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	85.95	79.34	92.31
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	90.59	91.40	100.89
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan gedung	0.40	0.40	100.00
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.27	0.20	74.07
		Ketaatan terhadap RTRW	91.34	92.98	101.80
		Rasio Tenaga Teknis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	60.00	31.40	52.33
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	91.60	85.31	93.13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 (data diolah)

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

a. Indikator Tujuan

Perbandingan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2024 dengan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2023, 2022 dan 2021 sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Realisasi 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Infrastruktur Daerah	74.27	72.98	98.26	74.27	73.01	98.3	74.27	73.53	99.00
2	Indeks Ketaatan terhadap RTRW (i)	92.98	90,95	97.82	92.98	91,00	97,87	92.98	91,02	97,90
3	Indeks Reformasi Birokrasi	83,07	82.87	99.76	83,07	106.08	127.7	83,07	93,17	112.15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 (data diolah)

Keterangan : Indikator kinerja Nomor 2 (dua) tidak tertuang dalam renstra 2023-2026

b. Indikator Kinerja Sasaran

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2023, 2022, dan 2021 sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022, dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Realisasi 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi	59.86	61.45	102.66	59.86	61.45	102.66	59.86	77.94	130.20
		Persentase penduduk berakses air minum	71.74	95.98	133.79	71.74	95.98	133.79	71.74	85.75	119.53
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79.86	-	-	79.86	-	-	79.86	77.18	96.64
		Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61.49	33.50	54.48	61.49	33.50	54.48	61.49	72.77	118.34

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Realisasi 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	61.49	60.84	98.94	61.49	60.84	98.94	61.49	60.06	97.67
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	97.34	93.82	96.38	97.34	93.82	96.38	97.34	95.63	98.24
		Rasio jaringan irigasi	0.67	0.95	141.79	0.67	0.95	141.79	0.67	0.95	141.79
		Persentase jalan desa strategis dalam kondisi baik	28.25	-		28.25	-		28.25	25.20	89.20
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	10.52	10.61	100.86	10.52	10.61	100.86	10.52	10.52	100.00
		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	79.34	-		79.34	-		79.34	79.34	100.00
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	91.40	90.88	99.43	91.40	90.88	99.43	91.40	90.53	99.05
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan gedung	0.40	0.38	95.00	0.40	0.38	95.00	0.40	0.39	97.50
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.20	0.27	100.00	0.20	0.27	135.00	0.20	0.27	135.00
		Ketaatan terhadap RTRW	92.98	91.00	97.87	92.98	91.00	97.87	92.98	91.02	97.89
		Rasio Tenaga Teknis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	31.40	-	102.66	31.40	-	-	31.40	40	127.39
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	85.31	-	133.79	85.31	-	-	85.31	83.37	97.73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 (data diolah)

Sesuai dengan perbandingan realisasi capaian kinerja diatas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi

Capaian Kinerja

Dilihat dari tabel capaian Indikator Kinerja OPD diatas maka capaian kinerja dapat dipenuhi sekalipun masih ada kelemahan-kelemahan dan kendala dalam pencapaian Kinerja tersebut dan terdapat tambah kurang indikator kinerja disesuaikan dengan Renstra OPD Tahun 2023 – 2026.

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja untuk Program ini adalah masih minimnya Sumber Daya Manusia dan masih lemahnya sinkronisasi data antar bidang, serta Refocusing anggaran juga merupakan permasalahan yang dihadapi
- Solusi : Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan penyusunan laporan. Meningkatkan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas pada bidang masing-masing.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif

Capaian Kinerja

Dilihat dari tabel capaian Indikator Kinerja OPD diatas maka capaian kinerja dapat dipenuhi sekalipun masih ada kelemahan-kelemahan dan kendala dalam pencapaian Kinerja tersebut dan terdapat tambah kurang indikator kinerja disesuaikan dengan Renstra OPD Tahun 2023 – 2026.

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja untuk Program ini adalah adanya pengurangan pagu yang diakibatkan bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu; adanya perubahan kondisi lapangan sehingga mengakibatkan penyerapan fisik dan keuangan tidak

- Solusi : Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan penyusunan laporan. Meningkatkan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas pada bidang masing-masing.

3.3. URAIAN

Dari uraian-uraian dan gambaran tentang analisis untuk mencapai Indikator-Indikator Kinerja tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa capaian-capaian untuk indikator-indikator tersebut tidak semuanya mencapai target serta perbandingan antara tahun ke tahun tidaklah merata ini dipengaruhi oleh anggaran yang ada. Disisi lain lokasi-lokasi untuk pelaksanaan pekerjaan masih kurang serta kurangnya kesadaran penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dan kurangnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 Sebesar **Rp.193.674.484.050 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Delapan Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah)** dan **Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.250.000.000,-** yang diperuntukkan membiayai sebanyak 12 program dan 25 Kegiatan.

Adapun anggaran per program, realisasi keuangan masing-masing program dapat terlihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Target dan Realiasi Anggaran tahun 2024

No Rek.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		193.674.484.050	119.966.769.309	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		193.674.484.050	119.966.769.309	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi	2.370.611.693	12.759.330.408	

		Kinerja Perangkat Daerah			
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	27.170.198.050	18.169.358.528	
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.043.468.950	6.082.118.666	
04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	600.000.000	89.510.666	
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	763.477.100	132.051.100	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	11.735.177.000	8.676.035.329	
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	0	0	
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	24.825.419.550	13.145.993.176	
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.251.607.928	3.925.451.530	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	86.942.121.872	55.975.198.362	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	800.000.000	548.238.044	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	727.593.600	463.484.166	

Sumber : Target dan Realiasi Anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran / realisasi keuangan tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, hal ini diakibatkan beberapa faktor antara lain :

1. Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan daerah kepulauan sangat berpengaruh pada perubahan iklim/cuaca dan gelombang laut.

2. Refocusing APBD Tahun 2023, Sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan.
3. Proses Pengadaan yang lambat sehingga proses penyerapan fisik dan keuangan mengalami keterlambatan.
4. Adanya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan karena singkatnya waktu pelaksanaan akibat perubahan dokumen anggaran.
5. Kelalaian penyedia
6. Ketersediaan bahan material, SDM
7. Kesadaran masyarakat

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah efisien penggunaan sumber daya. Efisien dilakukan berkaitan dengan sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah telah mencapai tingkat produktifitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Tingkat efisien sumber daya pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisien
1	Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi	72.24	87.95	121.75
		Persentase penduduk berakses air minum	78.10	58.33	74.69
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	96.96	60.33	62.22
		Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78.03	65.78	84.30
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	92.70	66.78	72.04
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	98.98	73.10	73.85
		Rasio jaringan irigasi	70.53	73.80	104.64
		Persentase jalan desa strategis dalam kondisi baik	91.45	83.10	90.87
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	110.50	58.13	52.61

		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	92.31	79.34	85.95
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	100.89	77.60	76.92
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan gedung	100.00	90.20	90.20
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	74.07	98.45	132.91
		Ketaatan terhadap RTRW	101.80	98.30	96.56
		Rasio Tenaga Teknis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	52.33	62.38	119.21
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	93.13	90.25	96.91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 (data diolah)

BAB IV PENUTUP

4. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya target kinerja tujuan dan sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Utama yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama masih ada yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum.
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum tercapai.
4. Realisasi Keuangan yang belum sepenuhnya tercapai.

4.2. SARAN

1. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran agar dilakukan lebih baik sehingga tidak ada lagi revisi atau perubahan DPA yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran
2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis / fungsional.
3. Memberikan porsi anggaran yang sesuai untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama yang menunjang pemenuhan SPM maupun indicator lainnya yang belum tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh insan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah kepada publik maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang sesuai kewenangannya untuk bersama-sama mewujudkan Maluku Tengah yang lebih berkualitas, sejahtera, damai dan berkeadilan. Semoga Laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas, transparan, representative dan kredibel bagi semua pihak dan juga sebagai bahan untuk selalu memperbaiki kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah pada tahun-tahun berikutnya.

Masohi, Januari 2025

Kepala Dinas,



MASAN FIRDAUSI, ST

NIP. 19740703200312100